PENYUSUNAN AWP – 2019

-

REVISI OWP & AWP 2018

FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM

INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

BOGOR - 24 Mei 2018

ALUR KEGIATAN UTAMA PROGRAM - IPDMIP

- Peraturan dan perundangan yang mendukung - **DLI 2**
- Dukungan anggaran pemerintah (internalisasi RP2I dalam RPJMD) Pedoman Teknis bidang Irigasi
- Institutional Arrangement / Farmer Participation : **KOMIR (DLI 3), WUA (DLI 6), WUAF ; IMU**

Assessment

- PSETK - **DLI 7**
- PAI - **DLI 5**
- IKSI - **DLI 1**
- SID Menyeluruh (Ketersediaan air, ketersediaan lahan, ketersediaan petani dan potensi pertanian dll

SID

Rehabilitation - DLI 8

Design	*Construction / Supervision*	*PROM 1*
PROM 2		

O&P

Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi (RP_2I) - **DLI 4**

Agriculture Production Improvement

Input Pertanian | **Teknologi** | **Mekanisasi** | **Akses Kredit** | **Keterampilan** | **Pendukung**

KETAHANAN PANGAN KESEJAHTERAAN PETANI

OUTPUT KEGIATAN DAERAH- IPDMIP

Komponen 1: Penguatan Sistem dan Kapasitas Kelembagaan Irigasi Pertanian yang Berkelanjutan

a) Adanya **88 Komisi Irigasi** (14 Provinsi dan 74 Kabupaten) yang beroperasi sesuai dengan indikator penilaian kinerja yang telah ditetapkan
b) Ditetapkannya **74 RP_2I** (Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi) oleh Bupati
c) Tersedinya Tenaga Pendamping Masyarakat di 74 kabupaten untuk melakukan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) maupun Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan) serta mendukung pelaksanaan kegiatan PPSI dan pertanian di daerah irigasi.

Komponen 2: Perbaikan Pengelolaan dan O&P Irigasi:

a) Tersusunnya **719 PSETK** (Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan) Daerah Irigasi.
b) Adanya **4,500 P3A** yang beroperasi sesuai dengan indikator penilaian kinerja P3A yang ditetapkan.

Komponen 3: Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi

a) Terehabilitasinya Jaringan Irigasi seluas **125,977 ha** di Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten dan **55,887 ha** Daerah Irigasi kewenangan Provinsi;

OUTPUT KEGIATAN DAERAH- IPDMIP

Komponen 4. Peningkatan Pendapatan dari Pertanian Beririgasi

Sub Komponen 4.1. Peningkatan produktivitas usaha tani dan layanan pendukungnya

1. Paling sedikit **75% dari 900.000** rumah tangga penerima manfaat IPDMIP memiliki akses kepada layanan penyuluhan;
2. Paling sedikit **10.000 penyuluh** dilatih dan bekerja di lokasi IPDMIP.

Sub Komponen 4.2. Peningkatan akses pasar dan layanan pendukungnya

1. Paling sedikit **200.000 petani** penerima manfaat IPDMIP dilatih mengenai pengembangan rantai nilai;
2. Paling sedikit **500 petani** penerima manfaat IPDMIP dapat mengakses input produksi dan paket teknologi.

Sub Komponen 4.3. Peningkatan layanan jasa keuangan dan penggunaan layanan tersebut

1. Paling sedikit **75% dari 900.000** penerima manfaat IPDMIP memiliki akses kepada layanan keuangan (simpan-pinjam, asuransi, dan lain-lain);
2. Paling sedikit **8 penyedia layanan keuangan** menyediakan jasa keuangan yang terjangkau dan memadai bagi petani penerima manfaat di wilayah perdesaan lokasi IPDMIP.

HASIL WORKSHOP : PENYUSUNAN OWP & AWP 2017-2018 IPDMIP

SEMARANG, DESEMBER 2017

1. Penyiapan anggaran Balai/Balai Besar masih mengalami kesulitan karena:
   a) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari NPIU belum ada
   b) Petunjuk teknis RP2I, P3A, PSETK belum memadai
   c) Belum ada pengarahan yang memadai tentang rencana pelaksanaan SID
2. Penyiapan anggaran di daerah (DPA)
   a) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari NPIU belum ada
   b) Surat Perjanjian Hibah Daerah antara Menteri Keuangan dengan Kepala Daerah belum ada
   c) Sebagian pemerintah daerah sudah menyusun DPA dan perlu di dukung oleh NPMU untuk menyempurnakannya
3. Penyerahan SPPH
   a) Tidak semua Pemerintah Daerah menerima SPPH karena tidak hadir pada workshop ini.

HASIL WORKSHOP : PENYUSUNAN OWP & AWP 2018 IPDMIP

SEMARANG, DESEMBER 2017

REKAPITULASI		
	Bappeda	PUSDA
Kabupaten		
Sudah	37	58
Belum	37	16
	74	74
Provinsi		
Sudah	9	9
Belum	5	5
	14	14

Provinsi	Bappeda	Dinas PSDA
1 NAD	561,575	159,500
2 Sumut	-	-
3 Sumbar	-	-
4 Sumsel	-	16,212,000
5 Lampung	746,100	320,438
6 Jabar	-	-
7 Jatim	4,337,766,279	455,250
8 Kalbar	1,822,750	643,750
9 Kalsel	2,056,250	639,821
10 Sulut	-	-
11 Sulteng	1,211,575	11,052,350
12 Sulsel	1,354,275	22,010,000
13 NTB	2,344,525	-
14 NTT	1,409,800	14,303,999
Total	4,349,273,129	65,797,108

Kabupaten	Bappeda	Dinas PSDA
1 Aceh Besar	243,688	12,678,952
2 Aceh Utara	-	7,410,620
3 Aceh Timur	-	655,000
4 Bireun	-	13,408,338
5 Tapanuli Tengah	289,794	276,050
6 Asahan	-	467,650
7 Humbang Hasundutan	-	457,650
8 Simalungun	-	404,400
9 Sinjunjung	-	1,229,350
10 Pasaman	-	531,250
11 Limapuluh Koto	350,125	365,300
12 Pasaman Barat	267,725	5,807,801
13 Pesisir Selatan	-	332,200
14 Musi Rawas	321,575	654,250
15 Empat Lawang	293,525	-
16 Ogan Komering Ulu Selatan	-	737,250
17 Muara Enim	330,950	713,000
18 Musi Banyuasin	262,025	518,400
19 Banyuasin	233,050	582,700
20 Lahat	247,900	52,750
21 Pesawaran	-	5,166,565
22 Tanggamus	-	-
23 Lampung Tengah	-	858,704
24 Tulangbawang	-	470,400
25 Mesuji	-	622,400
26 Serang	-	-
27 Pandeglang	-	-

HASIL WORKSHOP : PENYUSUNAN OWP & AWP 2017-2018 IPDMIP

SEMARANG, DESEMBER 2017

	Kabupaten	Bappeda	Dinas PSDA
28	Garut	-	21,455,729
29	Indramayu	-	-
30	Kuningan	-	678,000
31	Ciamis	-	-
32	Sukabumi	-	490,000
33	Majalengka	-	512,000
34	Sumedang	-	-
35	Kebumen	305,500	493,600
36	Banjarnegara	-	370,250
37	Purworejo	262,859	682,435
38	Pekalongan	226,195	-
39	Pati	-	1,346,313
40	Banyumas	354,275	487,000
41	Cilacap	266,449	9,169,580
42	Bojonegoro	-	3,890,669
43	Ngawi	-	554,000
44	Lamongan	193,000	-
45	Kediri	257,925	589,000
46	Madiun	314,575	413,000
47	Lumajang	353,825	449,066
48	Jember	273,600	-
49	Jombang	295,250	786,000
50	Tuban	299,230	2,589,585
51	Ketapang	-	420,750
52	Kubu Raya	-	427,850
53	Sambas	468,200	593,000
54	Kayong Utara	-	10,511,255

	Kabupaten	Bappeda	Dinas PSDA
55	Hulu Sungai Tengah	256,813	352,150
56	Tapin	240,313	362,150
57	Barito Kuala	-	547,650
58	Tanah Bumbu	396,858	495,000
59	Minahasa Selatan	-	-
60	Bolaang Mongondow	-	-
61	Toli Toli	238,800	644,785
62	Poso	209,938	427,087
63	Banggai	352,463	2,656,925
64	Wajo	417,405	541,924,415
65	Pinrang	242,575	-
66	Sidenreng Rappang	278,175	890,500
67	Soppeng	248,275	657,100
68	Bone	1,437,320	-
69	Lombok Tengah	238,025	-
70	Lombok Timur	-	-
71	Bima	208,775	1,598,315
72	Dompu	341,175	607,500
73	Manggarai Barat	-	2,996,074
74	Manggarai Timur	268,875	1,391,685
	Total	12,087,025	666,861,398

RENCANA KEGIATAN di SATKER PROVINSI

KEGIATAN	2018	2019	2020	2021
PPIU-Bappeda				
1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi				
1.1. Pendirian/Revitalisasi KOMIR	■			
1.2. Pelatihan KOMIR	■			
1.3. Rapat/Pertemuan KOMIR	■			
2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama				
2.1. Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI)	■			
2.2. Workshop PPSIP	■			
2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Konversi lahan/keamanan pangan - LP2B		■		
2.4. Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan		■		
2.5. Sosialisasi Peraturan daerah provinsi		■		
3. Pembuatan Sistem Sertifikasi Kompetensi untuk Staf dan Fasilitator	■			
3.1. Pelatihan TPM dan Koordinator TPM di 14 Propinsi				
4. Pendampingan - TPM	■	■	■	■
a. Koordinator (1 orang per kabupaten)	■	■	■	■
b. Fasilitator/TPM	■	■	■	■
c. Biaya Operasional Koordinator	■	■	■	■
d. Biaya Operasional Fasilitator/TPM	■	■	■	■
5. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Bappeda	■	■	■	■
6. Pelaksanaan dan penyusunan PSETK	■	■		

MASUK DALAM AWP 2018

MASUK AWP 2019

RENCANA KEGIATAN di SATKER PROVINSI

KEGIATAN	2018	2019	2020	2021
PPIU-PUSDA				
1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi				
1.1. Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR				
1.2. Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD)				
2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama				
2.1. Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)				
2.2. Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)				
2.3. Pelaporan Performa PPSI untuk Daerah Irigasi Provinsi				
2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah tentang Pemberdayaan P3A				
4. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Dinas PSDA				
5. Kunjungan Belajar ke Kabupaten yang Sukses				
6. Pengisian data RP2I				
7. Pembuatan SPM Irigasi Provinsi				
8. Rehabilitasi Daerah Irigasi				
9. Pengadaan Fasilitas OP				
10. Kampanye Penyadaran Efisiensi Air				

MASUK DALAM AWP 2018

MASUK AWP 2019

RENCANA KEGIATAN di SATKER KABUPATEN

KEGIATAN	2018	2019	2020	2021
KPIU-Bappeda				
1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi				
Pendirian/Revitalisasi KOMIR				
KOMIR Meetings (3 kali per tahun)@ 20 orang				
2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama				
Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI)				
Workshop PPSIP				
Penetapan Perda ttg Irigasi (PPSI) kabupaten				
3. Pengesahan Rencana 5 tahunan Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)				
4. Unit Pelaksana Program Tkt. Kabupaten - Bappeda				
5. Penyusunan PSETK di tingkat DI				
Pelaksanaan dan penyusunan PSETK				
Pelaksanaan dan penyusunan PSETK - B				
Pelaksanaan dan penyusunan PSETK -C				
6. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi tingkat kabupaten (RP2I)				
Pembentukan Tim Penyusun RP2I				
Sosialisasi Draft RP2I				

MASUK DALAM AWP 2018

MASUK AWP 2019

RENCANA KEGIATAN di SATKER KABUPATEN

KEGIATAN	2018	2019	2020	2021
KPIU-PUSDA				
1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi				
Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR	■			
Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD)		■	■	■
2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama				
Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)	■			
Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Perda tentang Irigasi (PPSI)	■			
Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI Kabupaten	■			
Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Pemberdayaan P3A	■			
3. Project Implementing Unit - MoPW-DGWR				
Unit Pelaksana Program Tkt. Kabupaten - Dinas PU	■	■	■	■
4. Pengisian data RP2I		■		
5. Pembuatan SPM Irigasi Kabupaten	■	■		
6. a. Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A	■			
b. Pembentukan (IP3A) - 1 per DI	■			
6.2. Pelatihan P3A/GP3A				
Pelatihan P3A - 5 paket	■	■		
Pelatihan GP3A - 1 paket	■	■		
Studi banding P3A ke Kabupaten yang berhasil				
6.3. Evaluasi Kinerja P3A				
Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A	■	■	■	■
7. Rehabilitasi		■	■	■
8. Fasilitasi OP		■	■	■

MASUK DALAM AWP 2018

MASUK AWP 2019

AREAL PROGRAM IPDMIP dan TARGET KEGIATAN

Kewenangan	D.I.	Ha
Pusat	126	919.132
Provinsi	301	440.119
Kabupaten	12.370	1.167.366
Total	12.797	1.526.617

Target :

- Rehabilitasi : 500.000 ha
- PSETK : ± 12.000 DI / 2,5 Juta Ha
- PAI/IKSI : ± 12.000 DI / 2,5 Juta Ha
- KOMIR : 14 Prov, 74 Kab
- TPM : ± 2,5 Juta Ha
- RP2I : 74 Kab

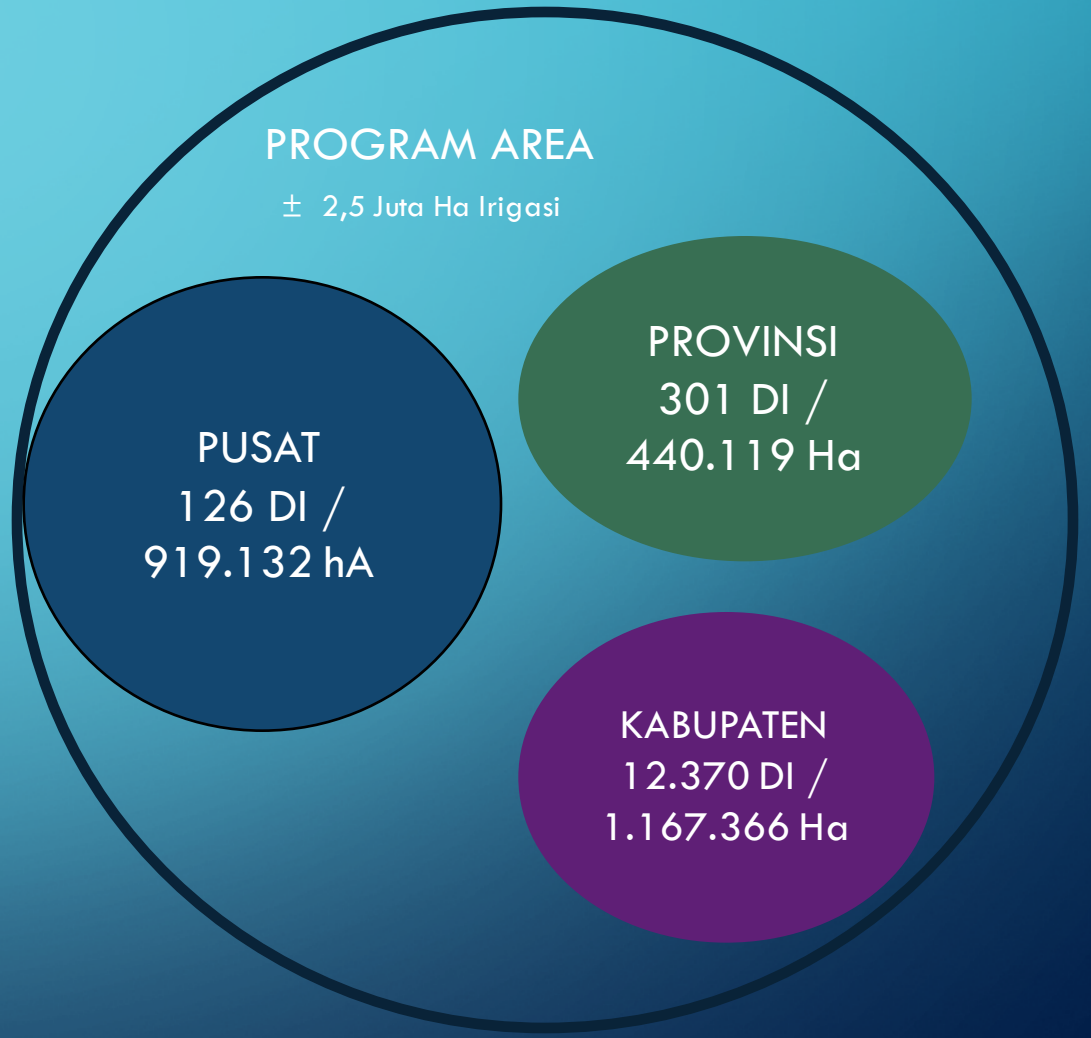

FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
BOGOR - 24 Mei 2018

TARGET CAPAIAN

1. Revisi AWP 2018
2. Alokasi DPA 2018
3. Usulan AWP 2019
4. Inventarisasi Penerimaan Dokumen NPHD
5. Pengumpulan SK KPMU, PPIU, KPMU dan KPIU
6. PENYUSUNAN RENCANA KERJA
    A. Penyusunan Rencana Kerja Penguatan Komisi Irigasi
    B. Penyusunan Rencana Kerja Penguatan P3A
    C. Penyusunan Rencana Kerja TPM
    D. Penyusunan Rencana Kerja PSETK
    E. Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan RP2I

FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
BOGOR - 24 Mei 2018

TARGET CAPAIAN

1. Revisi AWP 2018
2. Alokasi DPA 2018
3. Usulan AWP 2019
4. Inventarisasi Penerimaan Dokumen NPHD
5. Pengumpulan SK KPMU, PPIU, KPMU dan KPIU
6. PENYUSUNAN RENCANA KERJA
    A. Penyusunan Rencana Kerja Penguatan Komisi Irigasi
    B. Penyusunan Rencana Kerja Penguatan P3A
    C. Penyusunan Rencana Kerja TPM
    D. Penyusunan Rencana Kerja PSETK
    E. Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan RP2I

PEMBAGIAN DESK

DESK 1
OWP & AWP

DESK 3
OP (P3A; RP2I; PAI&IKSI)

DESK 5
e-FILLING & SOCIAL SAFEGUARD

DESK 2
IRIGASI (REHABILITASI)

DESK 4
PERTANIAN

TERIMAKASIH

FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM

INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

BOGOR - 24 Mei 2018